

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan temuan dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di sembilan kabupaten termiskin Provinsi Sumatera Barat. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan kualitas proses pembelajaran yang bermutu, pelayanan medis, dan standar hidup masyarakat secara nyata mampu menekan angka kemiskinan, sehingga pembangunan manusia menjadi salah satu faktor fundamental dalam strategi pengentasan kemiskinan.

Sementara itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kemiskinan. Meskipun secara teori peningkatan pengangguran mendorong naiknya tingkat kemiskinan, dalam konteks penelitian ini pengaruhnya tidak nyata. Hal tersebut dimungkinkan karena sebagian besar masyarakat masih dapat mempertahankan kehidupan melalui aktivitas di sektor informal.

Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap kemiskinan. Hasil ini menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi di sembilan kabupaten termiskin belum bersifat inklusif, karena lebih banyak dikuasai oleh sektor *capital intensive* yang relatif rendah dalam penyerapan tenaga kerja. Akibatnya, manfaat pertumbuhan ekonomi tidak dirasakan secara langsung oleh masyarakat miskin.

Adapun ketimpangan pendapatan (Gini Ratio) berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kemiskinan. Meskipun distribusi pendapatan di wilayah penelitian cenderung tidak merata, faktor tersebut bukan merupakan determinan utama kemiskinan. Kondisi kemiskinan lebih banyak dipengaruhi oleh faktor struktural lainnya, seperti rendahnya kualitas sumber daya manusia, keterbatasan akses terhadap infrastruktur, serta minimnya kesempatan ekonomi di daerah tertinggal.

Secara simultan, keempat variabel penelitian yaitu IPM, TPT, pertumbuhan ekonomi, dan ketimpangan pendapatan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan dengan nilai koefisien determinasi sebesar 43,75 persen. Hal ini berarti hampir setengah variasi tingkat kemiskinan di sembilan kabupaten termiskin Provinsi Sumatera Barat dapat diperlihatkan oleh variabel-variabel tersebut, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak berada dalam penelitian ini.

5.2 Saran

Berdasarkan temuan penelitian ini, terdapat beberapa saran yang dapat disampaikan, baik dari sisi kebijakan maupun pengembangan penelitian akademik ke depan:

1. Pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Barat diharapkan dapat terus meningkatkan pembangunan manusia secara menyeluruh dan merata, mengingat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terbukti berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Fokus peningkatan IPM sebaiknya tidak hanya terbatas pada aspek proses pembelajaran yang bermutu dan pelayanan medis, tetapi juga memperhatikan daya beli masyarakat serta standar hidup layak agar dampaknya terhadap pengurangan kemiskinan semakin kuat dan dirasakan secara merata di seluruh kabupaten.
2. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif perlu menjadi prioritas kebijakan pembangunan daerah. Hasil studi memperlihatkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan, yang mengindikasikan bahwa kelompok miskin belum menikmati hasil pembangunan secara proporsional. Untuk itu, bagi pemerintah daerah agar mendorong pertumbuhan yang ada pada pihak masyarakat bawah, melalui penguatan sektor UMKM, pertanian rakyat, industri kecil, serta ekonomi berbasis komunitas lokal yang berpotensi besar dalam menyerap tenaga kerja miskin.
3. Variabel Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) meskipun tidak signifikan, tetap perlu menjadi perhatian. Pemerintah perlu mendorong penciptaan lapangan kerja produktif, terutama di sektor informal yang banyak menampung

masyarakat miskin. Program pelatihan keterampilan kerja, proses pembelajaran yang bermutu vokasi, dan inkubasi wirausaha diharapkan mampu meningkatkan kapasitas tenaga kerja lokal serta mengurangi risiko pengangguran terbuka yang berpotensi menambah beban kemiskinan.

4. Ketimpangan pendapatan (Gini Ratio) yang berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kemiskinan tetap harus diantisipasi. Pemerintah daerah perlu merancang kebijakan pemerataan hasil pembangunan dengan memperluas akses masyarakat miskin terhadap sumber daya ekonomi, layanan publik, dan infrastruktur dasar. Dengan demikian, kesenjangan kesejahteraan antar kelompok masyarakat dapat ditekan dan peluang bagi masyarakat miskin untuk meningkatkan taraf hidup menjadi lebih besar.
5. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk menambahkan variabel-variabel lain yang juga relevan dalam mempengaruhi kemiskinan, seperti tingkat inflasi, investasi publik, upah minimum regional, maupun belanja bantuan sosial daerah. Selain itu, pendekatan penelitian dapat dikembangkan ke arah metode campuran (kuantitatif-kualitatif) agar mampu menangkap aspek kemiskinan yang tidak sepenuhnya terukur secara statistik, seperti dimensi sosial, budaya, dan psikologis masyarakat miskin di kabupaten tertinggal.

